

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan isu struktural yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan ketersediaan kesempatan kerja menyebabkan tekanan serius pada pasar tenaga kerja nasional. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan lapangan pekerjaan yang produktif serta situasi ekonomi domestik yang belum sepenuhnya stabil. Dalam konteks tersebut, bekerja ke luar negeri sering dipandang sebagai alternatif strategis untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, sehingga mendorong meningkatnya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Migrasi internasional tenaga kerja atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah proses perpindahan pekerja dari negara asal ke negara tujuan lintas batas negara dengan tujuan utama memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Praktik migrasi ini umumnya memberikan berbagai keuntungan, terutama dari sisi ekonomi bagi pekerja maupun keluarganya (Santoso & Artaningtyas, 2024).

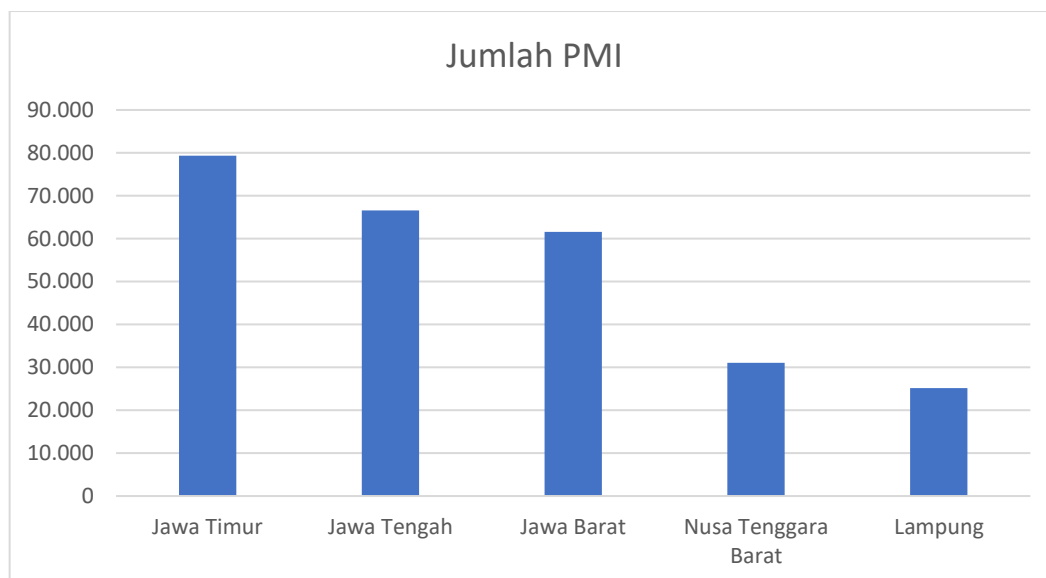
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai 281,60 juta jiwa, meningkat sebesar 26,02 juta jiwa dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 255,59 juta jiwa. Selama periode 2015–2024, rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai sekitar 1,80 persen setiap tahun (BPS, 2025). Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun turut menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 tercatat sebanyak

154,00 juta jiwa atau meningkat sebesar 1,89 juta jiwa dibandingkan Agustus 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 146,54 juta jiwa merupakan penduduk yang bekerja, atau bertambah 1,90 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2025).

Meskipun jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan, permasalahan pengangguran tetap menjadi isu penting yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja. Dengan demikian, tekanan struktural pada pasar tenaga kerja domestik menjadi salah satu faktor utama pendorong masyarakat untuk memilih bekerja ke luar negeri. Mobilitas tenaga kerja internasional kemudian menjadi strategi ekonomi rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi kerentanan ekonomi, dan memperluas peluang kesejahteraan.

Keberangkatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri memberikan berbagai manfaat bagi negara, terutama dalam bidang ekonomi. Manfaat tersebut dapat dilihat dari bertambahnya devisa negara, meningkatnya investasi di daerah asal pekerja migran, serta membaiknya kondisi ekonomi keluarga yang menerima penghasilan dari luar negeri. Devisa yang berasal dari penghasilan Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi yang penting dalam mendukung aktivitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. (Zulfan Fikriansyah & Aan Julia, 2023).

Grafik 1. Lima Provinsi Asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Jumlah Terbanyak Tahun 2024



Sumber: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)

Berdasarkan Grafik, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi pada tahun 2024, yaitu sebanyak 79.339 orang. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 66.611 orang, Jawa Barat sebanyak 61.556 orang, Nusa Tenggara Barat sebanyak 30.540 orang, dan Lampung sebanyak 24.971 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi penerimaan remitansi karena semakin banyak PMI yang bekerja di luar negeri, semakin besar pula peluang pendapatan yang dikirimkan kepada keluarga di daerah asal. Oleh karena itu, Jawa Timur memiliki peran penting dalam mendukung kontribusi remitansi terhadap perekonomian dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

Sebagai provinsi dengan jumlah penempatan PMI tertinggi di Indonesia, Jawa Timur memiliki sejumlah kabupaten/kota yang menjadi penyumbang utama pengiriman Pekerja Migran Indonesia. Kabupaten/kota tersebut secara konsisten mencatat jumlah penempatan PMI yang tinggi selama periode 2020–2024, sehingga mencerminkan peran pentingnya sebagai daerah asal pekerja migran di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. Jumlah PMI Jawa Timur Tahun 2020 – 2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Total (Jiwa)
1.	Ponorogo	5.370	4.123	7.568	10.879	11.329	39.269
2.	Blitar	5.442	4.614	6.961	10.242	10.652	37.911
3.	Malang	5.578	4.824	6.589	9.332	10.289	36.612
4.	Tulungagung	4.010	2.362	5.200	7.946	8.029	27.547
5.	Banyuwangi	3.335	2.432	4.334	6.432	6.758	23.291
6.	Madiun	2.664	2.078	3.531	4.908	5.253	18.434
7.	Kediri	2.106	1.683	2.574	4.198	4.316	18.434

Sumber: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)

Berdasarkan data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), tabel jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunjukkan adanya dinamika perubahan pengiriman tenaga kerja migran sepanjang periode 2020 hingga 2024. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami peningkatan. Perubahannya cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, yang mencerminkan adanya perubahan dalam mobilitas tenaga kerja ke luar negeri. Penurunan jumlah PMI pada tahun 2021 menunjukkan bahwa proses penempatan pekerja migran tidak selalu berjalan stabil karena dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi pada periode tersebut. Setelah itu, jumlah PMI kembali meningkat hingga tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat

untuk bekerja di luar negeri tetap tinggi dan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi yang ada. Selain itu, tabel ini juga memperlihatkan bahwa tujuh kabupaten/kota yang tercantum secara konsisten menempati tujuh peringkat teratas sebagai daerah pengirim PMI di Jawa Timur selama periode pengamatan, sehingga menegaskan adanya kestabilan peran wilayah-wilayah tersebut sebagai basis utama pengiriman tenaga kerja migran.

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam distribusi pengiriman tenaga kerja migran antarwilayah. Kabupaten Ponorogo menempati posisi paling dominan sebagai daerah dengan jumlah PMI tertinggi, dengan capaian yang secara nyata melampaui kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat mobilitas tenaga kerja ke luar negeri di Kabupaten Ponorogo relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, seperti Malang, Blitar, Tulungagung, Banyuwangi, Madiun, dan Kediri, yang kontribusi pengiriman PMI berada pada tingkat lebih rendah. Dominasi tersebut sekaligus menunjukkan dinamika pasar tenaga kerja di Ponorogo yang ditandai oleh tingginya ketergantungan terhadap migrasi internasional sebagai strategi ekonomi rumah tangga (KP2MI, 2025).

Di Kabupaten Ponorogo yang merupakan daerah dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Banyaknya masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan di daerah ini masih menjadi tantangan. Kesempatan kerja yang tersedia di tingkat lokal masih terbatas, tingkat pendapatan yang diperoleh belum mampu memenuhi harapan sebagian masyarakat, serta adanya pengaruh lingkungan dan budaya migrasi yang telah berkembang sejak lama turut mendorong

masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Di sisi lain, tingginya jumlah PMI asal Ponorogo menyebabkan aliran remitansi yang diterima daerah juga cukup besar. Dana tersebut kemudian berperan dalam memengaruhi pola konsumsi, investasi, dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerimanya. Dengan demikian, migrasi tenaga kerja internasional dapat dipahami sebagai instrumen ekonomi yang strategis bagi masyarakat Ponorogo dalam merespons ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan akses pekerjaan di dalam negeri (Wahyuni & Sihalo, 2022).

Salah satu dampak paling nyata dari mobilitas tenaga kerja ke luar negeri adalah remitansi, yaitu kiriman dana yang dikirimkan pekerja migran kepada keluarga di tanah air. Remitansi berperan penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga melalui penguatan daya beli, pengurangan risiko kemiskinan, serta stabilisasi kondisi keuangan keluarga di daerah asal. Pada tingkat nasional, remitansi menjadi salah satu sumber devisa terbesar setelah migas dan pariwisata (Sari, 2019).

Tabel 2. Total Remitansi Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018–2024

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total Remitansi PMI (Juta USD)	10.974	11.435	9.427	9,164	12.845	14.217	15.702

Sumber: Bank Indonesia 2025

Berdasarkan data Bank Indonesia (2025) data total remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2018–2024, terlihat bahwa nilai remitansi mengalami fluktuasi. Setelah meningkat dari 10.974 juta USD pada tahun 2018 menjadi 11.435 juta USD pada tahun 2019, remitansi menurun pada tahun 2020–2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, remitansi kembali meningkat secara konsisten menjadi 12.845 juta USD pada tahun 2022, 14.217 juta USD pada tahun

2023, dan mencapai 15.702 juta USD pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan kontribusi remitansi PMI terhadap perekonomian Indonesia. Angka ini menegaskan besarnya kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian Indonesia serta peran strategis mereka dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Besarnya nilai remitansi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga penerimanya. Di banyak daerah kantong PMI, penggunaan remitansi cenderung berorientasi pada konsumsi jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang. Temuan Choirul Hamidah (2016) menunjukkan bahwa keluarga TKI di Ponorogo lebih banyak mengalokasikan remitansi untuk konsumsi dibandingkan investasi atau pengeluaran produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan remitansi belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang dapat mengurangi ketergantungan keluarga terhadap pekerjaan migran di masa mendatang. Efektivitas remitansi sangat bergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola keuangan dan kesiapan untuk memulai usaha produktif. Tanpa perencanaan yang matang, remitansi berisiko habis untuk kebutuhan sesaat dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan pendapatan berkelanjutan (Basrowi, 2018).

Inklusi keuangan produktif menjadi faktor kunci dalam mengarahkan pemanfaatan remitansi ke aktivitas yang lebih bernilai jangka panjang. Akses terhadap layanan keuangan formal, seperti tabungan, pembiayaan usaha, investasi, dan perlindungan keuangan, memberikan ruang bagi rumah tangga penerima remitansi untuk mengelola dana secara lebih terencana, aman, dan efisien. Inklusi keuangan ditandai dengan meningkatnya akses dan pemanfaatan layanan keuangan

formal sehingga individu memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola sumber dananya (Putri & Yudiaatmaja, 2024). Dengan demikian, inklusi keuangan tidak lagi sebatas menyediakan akses terhadap lembaga keuangan, melainkan berperan sebagai penghubung utama antara remitansi dan aktivitas ekonomi produktif. Semakin tinggi tingkat inklusi keuangan suatu rumah tangga, semakin besar pula peluang bagi remitansi untuk dimanfaatkan sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas hidup, memperkuat aset ekonomi, serta menciptakan stabilitas dan kemandirian finansial di masa depan.

Perkembangan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di Indonesia dapat dilihat melalui hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun perkembangan indeks inklusi keuangan Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 3. Indeks Inklusi Keuangan Indonesia

Tahun	Indeks Inklusi Keuangan (%)
2016	67,82
2019	76,19
2022	85,10
2024	75,02

Keterangan: Hasil tahun 2024 tidak dapat dibandingkan langsung dengan hasil 2016–2022 karena menggunakan metodologi baru bersama BPS.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), indeks inklusi keuangan Indonesia menunjukkan peningkatan dari 67,82% pada tahun 2016 menjadi 76,19% pada tahun 2019, kemudian meningkat kembali menjadi 85,10% pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa akses

masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal semakin luas. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan secara lebih optimal, termasuk untuk kegiatan yang bersifat produktif seperti menabung, memperoleh pembiayaan usaha, dan melakukan investasi sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Selain faktor ekonomi dan akses keuangan, gaya hidup rumah tangga turut memengaruhi tingkat kesejahteraan penerima remitansi. Peningkatan pendapatan dari luar negeri sering kali diikuti oleh perubahan pola konsumsi ke arah yang lebih modern dan konsumtif, terutama jika tidak diimbangi dengan perencanaan keuangan yang matang. Sebaliknya, ketika remitansi dikelola secara terencana, dana tersebut dapat diarahkan pada tabungan dan pembentukan aset jangka panjang yang lebih produktif. Hal ini tercermin pada pola pengelolaan keuangan pekerja migran yang membagi penghasilan untuk dikirim ke keluarga, ditabung, dan diinvestasikan, khususnya pada sektor properti, serta melakukan perencanaan keuangan sebelum masa purna kerja (Hadi Saputro et al., 2021). Oleh karena itu, gaya hidup yang rasional, disertai perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, menjadi faktor penting agar remitansi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga secara berkelanjutan.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran yang tinggi di Provinsi Jawa Timur. Banyak penduduknya memilih bekerja ke luar negeri, dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik dibandingkan bekerja di sektor informal atau pertanian di dalam negeri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesempatan ekonomi lokal dan potensi

pendapatan di luar negeri, yang menjadikan remitansi sebagai faktor penting dalam struktur ekonomi rumah tangga di Ponorogo.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaruh remitansi, inklusi keuangan produktif, dan gaya hidup terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana pengelolaan remitansi dan perilaku ekonomi rumah tangga dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga pekerja migran.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana remitansi berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Inklusi Keuangan Produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana Gaya Hidup berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran di Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana remitansi, inklusi keuangan produktif, dan gaya hidup secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui pengaruh Remitansi terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran di Kabupaten Ponorogo.

2. Mengetahui pengaruh Inklusi Keuangan Produktif terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran di Kabupaten Ponorogo
3. Mengetahui pengaruh Gaya Hidup terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran di Kabupaten Ponorogo
4. Mengetahui pengaruh remitansi, inklusi keuangan produktif, dan gaya hidup secara simultan terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran di Kabupaten Ponorogo.

Manfaat Penelitian:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara remitansi, inklusi keuangan produktif, dan gaya hidup terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran. Melalui proses analisis data dan penerapan metode penelitian kuantitatif, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman metodologis yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi di bidang penelitian ekonomi terapan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu perekonomian masyarakat migran.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini dapat memperkaya sumber referensi ilmiah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terutama dalam bidang ekonomi keluarga, ekonomi regional, dan studi ketenagakerjaan. Penelitian ini juga mendukung peningkatan kualitas akademik universitas melalui kontribusi karya ilmiah yang relevan dan aktual, khususnya yang berkaitan

dengan fenomena sosial-ekonomi pekerja migran yang banyak terdapat di wilayah Ponorogo.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji variabel serupa ataupun menambahkan variabel baru yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi rumah tangga pekerja migran. Selain itu, penelitian ini dapat membantu peneliti berikutnya dalam memperbaiki metode, memperluas cakupan penelitian, serta memberikan gambaran awal mengenai kondisi sosial-ekonomi keluarga migran di daerah yang menjadi fokus penelitian

